

**TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG  
PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP JUAL BELI  
HP BLACK MARKET DI "KARISMA CELL" JOMBANG**

**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada,  
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel  
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu  
Ilmu Syari'ah**

Oleh:

**DYNA THURISNA  
C02205066**



PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA	
No. KLAS	No. REG : S-2010 / M/054
S-2010 054 M	ASAL BUKU :
	TANGGAL :

**Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel  
Fakultas Syariah  
Jurusan Muamalah**

**SURABAYA  
2010**

**G-SM Comp  
Telp. 031-70064452**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Dyna Thurisina ini telah diperiksa dan disetujui untuk di Munaqasahkan.

Surabaya, <sup>15</sup> Februari 2010  
Pembimbing,



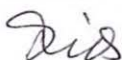
H. Muhammad Yazid, M.Si.  
NIP. 197311171998031003

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Dyna Thurisina ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2010, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam ilmu syariah.

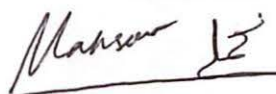
### Majlis Munaqasah Skripsi

Ketua



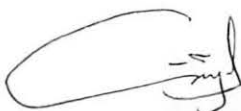
H. Muhammad Yazid, M.Si.  
NIP. 197311171998031003

Sekretaris



Ahmad Mansur, BBA. MEI  
NIP. 197109242003121003

Penguji I



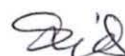
Dra. Hj. Suqiyah Musyafa'ah, M.Ag  
NIP. 1963303271999032001

Penguji II



H. Mohammad Arif, MA  
NIP. 197001182002121001

Pembimbing



H. Muhammad Yazid, M.Si.  
NIP. 197311171998031003

Surabaya, 9 Maret 2010

Mengesahkan,

Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Dr. H. A. Faishal Haq, M.Ag  
NIP. 195005201982031002









































Penelitian teknik analisis data yang digunakan adalah: deskriptif analisis, yaitu metode yang dimulai dari sebuah konsep atau teori yang kemudian dilakukan pengumpulan data yang di lapangan. Selanjutnya di analisis untuk menilai dan membuktikan kebenaran dari data tersebut apakah dapat diterima atau ditolak. Dalam arti menguraikan masalah tentang jual beli handphone *Black Market* dalam Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Secara keseluruhan, mulai dengan latar belakang, landasan teori dalam hukumnya, yang disusun secara obyektif dan sistematis. Sehingga bisa digunakan untuk menarik kesimpulan dengan menggunakan kerangka berfikir deduktif yaitu memaparkan masalah-masalah yang bersifat umum kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus.

#### **H. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan disusun secara sistematis yang tujuannya agar pembaca mudah memahami karya tulis ini, adapun sistematika tersebut meliputi hal-hal seperti penjabaran di bawah ini.

Bab pertama, pendahuluan yang merupakan landasan awal penelitian meliputi : latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, memuat tentang landasan teori yang berkaitan dengan studi ini yang terdiri dari sub-sub bab dan anak sub bab tentang jual beli dalam Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yaitu mengenai definisi jual beli, rukun dan syarat jual beli, hukum jual beli, macam-macam jual beli, jual beli yang dilarang, dan berselisih dalam jual beli yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Al-Hadīṣ serta jual beli dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Bab ketiga, merupakan pembahasan penelitian tentang jual beli handphone *Black Market* di “Karisma Cell” Jombang, dalam bab meliputi sejarah berdirinya, lokasi penelitian, modal yang dipergunakan untuk mendirikan “Karisma Cell”, jenis pelayanan yang disediakan, cara mendapatkan HP *Black Market*, cara merakit HP *Black Market*, perbandingan harga *Black Market* dengan yang asli, segmen pasar handphone *Black Market*, cara pelaksanaan akad jual beli, cara melakukan tawar menawar, cara melakukan pembayaran.

Bab keempat, setelah hasil riset dijabarkan, maka proses berikutnya adalah melakukan analisis terhadap pokok-pokok permasalahan yang sesuai dengan data-data diperoleh di Karisma Cell Jombang, kemudian pokok permasalahan yang sesuai dengan data-data tersebut perlu ditinjau dari segi Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, karena itu bab IV ini merupakan kerangka menjawab pokok permasalahan dengan metode ilmiah dan sistematis yang telah ditentukan. Adapun bab yang akan dibahas mengenai analisis cara mendapatkan handphone *Black Market*, analisis terhadap subyek













tak dapat dilaksanakan kecuali baru ada izin khusus dari walinya, dan tidak cukup dengan izin umum. Adalah sama antara *mumayyiz* yang normal penglihatannya dan yang tuna netra.

Apabila seorang anak yang sudah *tamyiz* membeli sesuatu barang yang sudah mendapat izin dari walinya, maka sahlah dan harus dilaksanakan jual beli tersebut dan bagi wali sudah tak punya hak untuk menolaknya. Adapun jika wali tidak memberi izin dan si anak membelanjakannya sendiri untuk kepentingan sendiri, maka jual belinya sah tetapi tidak dapat dilaksanakan sehingga wali memberi izin atau dia sendiri yang memberi izin sesudah ia dewasa.

- b) Hendaknya si *aqid* itu orang yang sudah pandai (orang yang sudah mengerti tentang ketentuan hitung). Ini sebagai syarat lulusnya jual beli. Maka tidak sah jual beli seorang pemboros yang luar biasa, hingga tak dapat memegang uang dan tidak mengenal hitung (*safih*), kecuali apabila si wali memberi izin kepada mereka.
- c) Hendaknya si *aqid* dalam keadaan tidak dipaksa (*mukhtar*). Maka tidak sah jual beli orang yang dipaksa.





















Syafi'iyah, membolehkannya dengan syarat jika ada maslahatnya bagi yang mempunyai harta, seperti khawatir rusak atau hilang.

Hanabilah berpendapat, yang merupakan pendapat lain dikalangan Syafi'iyah, bahwa jual beli *al-Fuḍuli* tidak sah karena orang yang membelanjakan harta tidak mempunyai hak terhadap harta itu, tidak mempunyai izin, tidak mempunyai kekuasaan, dan tidak menjadi wakil.

Disamping itu, ia juga menjual sesuatu yang tidak dapat diserahterimakan.

Pendapat yang benar adalah boleh melakukan jual beli *fuḍuli* jika mendapat izin dari pemilik harta.<sup>21</sup>

#### c. Jual Beli Untuk Kejahatan

Allah melarang kita menjual sesuatu yang dapat membantu terwujudnya kemaksiatan dan dipergunakan kepada yang diharamkan Allah. Karena itu, tidak boleh menjual sirup yang dijadikan untuk membuat khamer karena hal tersebut akan membantu terwujudnya permusuhan. Hal ini berdasarkan firman Allah Ta'ala

Artinya : *“Janganlah kalian tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan”* (QS. Al-Māidah : 2)<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup>Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar. Abdullah bin Muhammad Al-Muthlaq. Muhammad bin Ibrahim, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah*, h. 70-71

<sup>22</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 157











Proses legislasi UU Perlindungan Konsumen dapat dikelompokkan ke dalam tiga tahap. Tahap pertama, era tahun 80-an. Salah satu tanda di era ini adalah domonannya suara lembaga konsumen sebagai inisiator perlunya UU Perlindungan Konsumen. Instansi pemerintah bukan saja tidak peduli terhadap arti penting kehadiran UU Perlindungan Konsumen, tetapi justru sebaliknya menaruh curiga, bahwa kehadiran UU Perlindungan Konsumen, dikhawatirkan justru akan menghambat laju pertumbuhan pembangunan ekonomi.

Persisnya ide tentang perlunya UU Perlindungan Konsumen sudah mulai dirintis sejak Tahun 1981 dalam bentuk RUU Perlindungan Konsumen yang disusun oleh Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) bekerja sama dengan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN). Naskah awal ini telah disosialisasikan ke berbagai kekuatan sosial politik yang ada waktu itu, tidak terkecuali lembaga perwakilan (DPR), baik ditingkat komisi maupun fraksi, namun hasilnya nihil.

Tahap kedua, era awal tahun 90-an. Salah satu ciri dari era ini adalah pemerintah, dalam hal ini Departemen Perdagangan sudah memiliki kesadaran tentang arti penting adanya UU Perlindungan Konsumen. Hal ini diwujudkan adanya dua naskah RUU Perlindungan Konsumen. Yaitu; (1) hasil kerjasama dengan FH UGM dan (2) kerjasama dengan Lembaga





*Kedua*, UU Perlindungan Konsumen merupakan penjabaran lebih detail dari Hak Asasi Manusia, lebih khusus lagi hak-hak ekonomi. Sebagai bagian dari HAM, keberadaan UU Perlindungan Konsumen tidak dapat dilepaskan dari doktrin-doktrin HAM yang berlaku secara universal.

*Ketiga*, untuk dapat memahami suatu UU, terlebih dahulu harus mengetahui filosofi yang menjadi dasar dikeluarkannya produk hukum tersebut. Hal ini, pada umumnya dapat ditemukan dalam penjelasan bagian umum suatu UU.

Dalam konteks UU Perlindungan Konsumen, landasan filosofi yang dijadikan dasar, antara lain :

- a. Tingkat kesadaran konsumen akan hak-haknya masih sangat rendah. Hal ini terutama disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan konsumen;
- b. UU Perlindungan Konsumen pada dasarnya bukan merupakan awal dan akhir dari hukum yang mengatur Perlindungan Konsumen. Sebab, sampai terbentuknya UU Perlindungan Konsumen, telah ada beberapa UU yang materinya juga melindungi kepentingan konsumen;
- c. UU Perlindungan Konsumen merupakan payung (*umbrella act*) yang mengintegrasikan dan memperkuat penegakan hukum di bidang perlindungan konsumen. Jadi, hanya mengatur prinsip-prinsip pokok

















- 4) Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket, atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
- 5) Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- 6) Dan lain sebagainya;

Secara garis besar larangan yang dikenakan pasal 8 Undang-undang tersebut dapat kita bagi ke dalam dua larangan pokok, yaitu:

- b. Larangan mengenai produk itu sendiri, yang tidak memenuhi syarat dan standar yang layak untuk dipergunakan atau dipakai atau dimanfaatkan oleh konsumen;
- c. Larangan mengenai ketersediaan informasi yang tidak benar, dan tidak akurat, yang menyesatkan konsumen.

Larangan mengenai kelayakan produk, baik itu berupa barang dan/atau jasa pada dasarnya berhubungan erat dengan karakteristik dan sifat dari barang dan/atau jasa yang diperdagangkan tersebut. Untuk itu, informasi menjadi suatu hal yang penting bagi konsumen. Informasi yang demikian tidak hanya datang dari pelaku usaha saja, melainkan juga dari berbagai sumber yang dapat dipercaya, serta dipertanggungjawabkan sehingga pada akhirnya konsumen tidak dirugikan, dengan membeli barang dan/atau jasa yang sebenarnya tidak layak untuk diperdagangkan.

Seperti yang dikatakan di atas bahwa informasi merupakan hal penting bagi konsumen, karena melalui informasi tersebut konsumen dapat

mempergunakan hak pilihnya secara benar. Hak untuk memilih tersebut merupakan hak dasar yang tidak dapat dihapuskan oleh siapapun juga. Dengan mempergunakan hak pilihnya tersebut, konsumen dapat menentukan “cocok tidaknya” barang dan/ atau jasa yang ditawarkan/ diperdagangkan tersebut dengan “kebutuhan” dari masing-masing konsumen.

Dilihat dari kondisi saat ini, praktis konsumen berada pada posisi yang kurang menguntungkan dibandingkan dengan posisi dari pelaku usaha sebab keterlibatan konsumen dalam pemanfaatan barang dan/ atau jasa yang tersedia sangat bergantung sepenuhnya pada informasi yang diberikan oleh pelaku usaha. Bahkan untuk produk-produk barang dan/atau jasa yang secara tegas sudah diatur kelayakan penggunaan, pemakaian maupun pemanfaatannya pun, konsumen sering tidak memiliki banyak pilihan selain yang disediakan oleh pelaku usaha.

Untuk keperluan itulah Undang-undang memberikan aturan yang tegas mengenai hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/ atau jasanya kepada konsumen. Pasal 9 melarang pelaku usaha untuk menawarkan, mempromosikan, mengiklankan maupun memperdagangkan suatu barang dan/ atau jasa secara tidak benar, dan/ atau seolah-oleh:













































merupakan bidang usaha atau profesi mereka (bisnis). Perlindungan yang mereka perlukan adalah bagaimana agar dalam menjalankan bisnis mereka masing-masing, mereka tidak disaingi secara tidak wajar, tidak jujur atau lain-lain praktek bisnis yang menghambat usaha. Perlindungan itu adalah bagi kelangsungan perusahaan (bisnis) dan /atau pendapatan/penghasilan mereka.

Perbedaan kepentingan dan tujuan perlindungan itu haruslah terlihat pula dari siapa yang memerlukannya; misalnya kepentingan konsumen sebagai pribadi yang berbeda dengan kepentingan seorang atau sekelompok pelaku usaha. Untuk keperluan itu dibutuhkan batasan siapa yang dimaksudkan dengan pengguna barang dan/ atau jasa untuk keperluan pribadi (konsumen) dan siapa pula yang menggunakan barang dan/atau jasa tertentu untuk membuat/menyediakan barang atau jasa lain atau memperdagangkan (pengusaha atau pelaku usaha). Menyamakan batasan atau tidak membuat batasan bagi masing-masing kelompok, tak dapat tidak akan menimbulkan berbagai kesulitan hukum.

Sedang menurut ketentuan UU No.8/1999, pelaku usaha (importir) dilarang memperdagangkan barang yang tidak memenuhi standar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (pasal 8).

Bila tetap memperdagangkan produk (telekomunikasi) yang dilarang tersebut, akan dikenai sanksi administratif berupa ganti rugi sebanyak dua





3. Analisis Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa jual beli handphone *Black Market* bila dilihat dari segi hak dan kewajiban konsumen dan produsen tidak bertentangan dengan Undang-undang ini, karena para konsumen sudah mengetahui kerugian yang ia dapat bila membeli handphone ini. Konsumen lebih mementingkan harga yang ekonomis dari pada resiko yang akan muncul dikemudian hari. Kecuali bila konsumen belum mengetahui resiko yang akan dia dapat karena tidak adanya informasi yang jelas tentang kondisi handphone tersebut, maka jual beli ini bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

## **B. Saran**

1. Pada Pembaca (calon konsumen)
  - a. Tips sebelum membeli HP :
    - 1) Yang pertama, pastikan budget pembaca. Sesuaikan dengan kondisi keuangan.
    - 2) Sebelum berangkat ke toko, sebaiknya anda sudah punya pilihan yang mantap terhadap satu jenis HP dan mendetail serta sudah sesuai dengan budget pembaca. Sebagai contoh, ketika penulis mau beli HP baru, dari rumah penulis sudah mempunyai ketetapan hati untuk membeli HP dengan budget tidak lebih dari 1 juta, dan sebelumnya penulis sudah searching di Tabloid Pulsa tentang HP yang sesuai budget, dan terpilihlah HP SE W200. Jadi ketika penulis sampai di

Marina atau WTC, penulis langsung bertanya harga SE W200 dan menolak semua tawaran dari mbak/mas penjaga toko kalau disuruh milih merk lain. Kita harus bisa idealis tentang pilihan kita. Hal ini juga bisa menghindari kita dari pembengkakan budget.

- 3) Ketika sudah sampai toko, jangan sekalipun tergiur dengan fitur-fitur canggih yang dipromosikan sama mas/mbak penjaga toko, karena tidak semua fitur itu akan dipakai. Apalagi buat para pemula, Kalau memang tidak ada fitur baru yang dibutuhkan, lebih baik menggunakan HP lama. Bisa saja membeli ditoko yang menjual dengan harga yang lebih murah, karena margin dari jualan HP baru ini kecil.
- 4) Bila HP sudah berada dihadapan mata, terlebih dahulu periksa plastik luarnya untuk memastikan HP tersebut memang baru dan belum pernah di “bongkar” oleh orang lain. Selain plastik, perhatikan pula kondisi dusnya, bila ada yang robek-robek, minta dibawakan yang baru saja.
- 5) Setelah plastiknya dibuka dan HP dikeluarkan, yang harus diperhatikan berikutnya adalah kelengkapan HP tersebut. Paket standarnya untuk HP baru, HP, Baterai Original, Charger, Buku Panduan dan kartu garansi. Bila ada yang kurang dari itu, minta ditukar saja.







